

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* yang dimoderasi oleh moralitas pada pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Benda Kota Pekalongan yang berkaitan dengan alur pengadaan barang dan jasa. *Fraud* dalam organisasi pelayanan kesehatan merupakan isu krusial yang dapat merugikan institusi dan masyarakat. Isu *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) masih sering terjadi di Indonesia. RSUD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memiliki fleksibilitas keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat sesuai dengan Permendagri No.79 Tahun 2018. Namun, fleksibilitas ini juga mempunyai resiko yang tinggi dalam tindakan *fraud* pengadaan barang dan jasa. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus *fraud* pengadaan barang dan jasa menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan jenis kasus lainnya di Indonesia.

Kompetensi pegawai dan sistem pengendalian internal yang efektif diyakini mampu mencegah *fraud*. Selain itu, moralitas individu juga diduga memperkuat hubungan antara variabel-variabel tersebut terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian terdahulu terkait pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa sudah banyak dilakukan, namun dengan hasil yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pegawai yang terlibat dalam alur pengadaan barang dan jasa mulai dari usulan kebutuhan barang, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, dan pembayaran. Sampel penelitian adalah Kepala Unit/Ruang/Instalasi/Komite yang mewakili usulan kebutuhan barang. Karyawan bagian perencanaan dan evaluasi yang mewakili perencanaan dan penganggaran. Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Struktural yang mewakili sebagai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Karyawan bagian keuangan yang mewakili pembayaran. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menguji hubungan antar variabel serta peran moderasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa moral dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan, kompetensi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Serta moralitas tidak terbukti memperkuat pengaruh kompetensi dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*. Ketika seseorang memiliki nilai-nilai moral yang kokoh, cenderung lebih mengutamakan integritas dan kejujuran dalam setiap perilaku. Hal ini membuat individu tersebut lebih berhati-hati terhadap tindakan *fraud*. Sementara itu, pengendalian internal merupakan mekanisme sistematis yang

dirancang untuk mengawasi, mengatur, dan mengendalikan aktivitas organisasi agar berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian internal yang efektif mampu mencegah *fraud*. Dengan kata lain, pengendalian internal bertindak sebagai benteng pertahanan organisasi yang secara langsung mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Di sisi lain, kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* mengindikasikan bahwa kemampuan atau keahlian teknis saja tidak cukup untuk mencegah perilaku *fraud*. Kompetensi teknis mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas profesional, namun tanpa didukung oleh moralitas yang kuat dan sistem pengendalian yang efektif, kompetensi tersebut tidak akan mampu menghalangi individu untuk melakukan *fraud*. Moralitas tidak terbukti memperkuat pengaruh kompetensi dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* menunjukkan bahwa moralitas dan pengendalian internal berperan secara independen dalam mencegah *fraud*. Artinya, moralitas tidak hanya menjadi faktor pendukung kompetensi dan pengendalian internal, melainkan berdiri sendiri sebagai variabel yang memiliki pengaruh langsung. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam pencegahan *fraud*, di mana organisasi tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan teknis dan penerapan pengendalian internal, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang kuat pada seluruh anggota organisasi. Pendekatan multifaset ini memastikan bahwa setiap aspek yang berkontribusi pada perilaku *fraud* dapat ditangani secara menyeluruh, mulai dari individu hingga sistem organisasi.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menambah wawasan dalam literatur mengenai peran krusial kompetensi, pengendalian internal, dan moralitas dalam upaya pencegahan *fraud*, terutama di lingkungan organisasi sektor publik. Teori Hexagon menjadi dasar yang penting untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor kapasitas (kompetensi), nilai (moralitas), dan sistem (pengendalian internal) saling berinteraksi dalam membentuk tata kelola yang bersih. Implikasi praktis bagi manajemen RSUD Benda Kota Pekalongan untuk lebih fokus pada penguatan pengendalian internal dan peningkatan moralitas secara terpisah. Pengembangan kompetensi teknis harus terus dilakukan, tetapi hal tersebut saja tidak cukup untuk menjadi faktor utama dalam mencegah *fraud*.

Kata Kunci: Kompetensi, Pengendalian Internal, Moralitas, Pencegahan *Fraud*

SUMMARY

This study aims to analyze the influence of competence and internal control on fraud prevention, moderated by morality, among employees at Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bendan, Kota Pekalongan, particularly in relation to the procurement process of goods and services. Fraud within healthcare service organizations is a critical issue that can harm both institutions and the wider community. In Indonesia, fraud in the procurement of goods and services at public hospitals remains a frequent occurrence. RSUDs operating under the Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) are granted flexibility to apply sound business practices in accordance with Permendagri No. 79 of 2018. However, this flexibility also carries a high risk of procurement-related fraud. According to the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), procurement fraud cases rank the highest among all types of corruption cases in Indonesia.

Employee competence and effective internal control systems are believed to contribute to fraud prevention. Additionally, individual morality is hypothesized to strengthen the relationship between these variables and fraud prevention. While prior studies have addressed fraud prevention in procurement, their findings have often varied.

This study employs a quantitative method with a survey approach. Data were collected through questionnaires distributed to employees involved in the procurement process from needs identification, planning and budgeting, to implementation and payment. The research sample includes Heads of Units/Rooms/Installations/Committees representing goods requirement submissions; planning and evaluation staff representing the planning and budgeting stage; procurement officials, commitment-making officials, and structural officials representing the procurement implementation stage; and finance staff representing the payment stage. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to examine the relationships between variables and the moderating effect of morality.

The findings indicate that morality and internal control have a positive and significant influence on fraud prevention. However, competence does not significantly influence fraud prevention, and morality does not moderate the effects of competence or internal control on fraud prevention.

Individuals with strong moral values tend to prioritize integrity and honesty in their behavior, making them more cautious toward fraudulent actions. Meanwhile, internal control functions as a systematic mechanism designed to oversee, regulate, and monitor organizational activities to ensure they align with established policies and procedures. Effective internal control acts as a protective barrier that directly reduces opportunities for fraud. On the other hand, the insignificant effect of competence on fraud prevention suggests that technical skills alone are not sufficient to prevent fraudulent behavior. While technical competence involves knowledge, skills, and abilities necessary for professional tasks, without the support of strong morality and effective control systems, such competence is not enough to deter fraud.

Furthermore, the fact that morality does not moderate the influence of competence and internal control on fraud prevention suggests that morality and internal control operate independently in preventing fraud. This highlights the importance of a holistic approach to fraud prevention where organizations not only focus on improving technical competence and implementing internal controls, but also on cultivating strong moral and ethical values across all levels. This multifaceted approach ensures comprehensive mitigation of fraud risks, addressing both individual and systemic contributors.

The theoretical implication of this study enriches the literature on the critical roles of competence, internal control, and morality in fraud prevention, particularly within public sector organizations. The Hexagon Theory serves as a foundational framework to explain how capacity (competence), values (morality), and systems (internal control) interact to establish clean governance. From a practical standpoint, the findings suggest that management at RSUD Bendan Kota Pekalongan should focus more intensively on strengthening internal control and fostering morality as separate but equally important priorities. While technical competence should continue to be developed, it should not be relied upon as the primary means of fraud prevention.

Keywords: Competence, Internal Control, Morality, Fraud Prevention

